

BULETIN

PARLEMENTARIA



NOMOR 898/II/III/2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	
DANA DESA MARTAJASAH	
KECAMATAN BANGKALAN - KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR	
JENIS KEGIATAN	: PEMBANGUNAN JALAN ASPAL
VOLUME	: 210 x 2,5 m1
LOKASI	: DUSUN PETAMANAN
ALOKASI DANA	
DANA DESA	: Rp. 51.707.000,-
WAKTU PELAKSANAAN	: 3 BULAN
TAHUN ANGGARAN	: 2015
PELAKSANA	: PTPK DESA MARTAJASAH

DPR MINTA DANA DESA DIEVALUASI



FADLI ZON
DUKUNG BOIKOT
PRODUK ISRAEL



KOMISI I
BERHARAP KPI
TAK LANJUTKAN
UJI PUBLIK



BUMN PERTANIAN
PERLU BELAJAR
PADA PERUSAHAAN
SWASTA NASIONAL



Tim Kunker Komisi V DPR RI di Desa Martajasah, Bangkalan, Madura

DPR MINTA DANA DESA DIEVALUASI

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) untuk melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Pasalnya, ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Fary Djemy Francis mengatakan hal itu kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja Komisi V DPR dalam rangka Peninjauan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor DPRD, Bangkalan, Madura, Selasa (8/3).

Sejumlah Anggota Komisi V DPR seperti Sudjadi, Sigit Sosiantomo, Budi Yuwono (F-PDIP), Hanna Gayatri, Syahrulan Pua Sawa (F-PAN) Agung Budi Santoso (F-Demokrat), Gatot Sudjito (F-Golkar), Soehartono (F-Nasdem), Moh Nizar Zahro (F-Gerindra) dan Miryam S Haryani (F-Hanura) ikut dalam rombongan kunjungan kerja itu.

Menurut Fary Djemy Francis, bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana desa yang ditemukannya terkait adanya dana desa yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu kontraktor.

"Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor. Padahal dana desa itu untuk memberdayakan masyarakat. Kami tidak ingin dana desa dinikmati orang luar atau pihak ketiga sehingga masyarakat desanya justru tidak dapat apa-apa," kata Fary.

Temuan ini, menurut politisi partai Gerindra tersebut berdasarkan hasil evaluasi penggunaan anggaran tahun

2015. Sejatinya, selain untuk membangun desa, dana ini juga diperuntukkan memberdayakan potensi desa, dan mengakomodir kebutuhan desa.

"Yang merasakan langsung manfaat dana tersebut masyarakat desa itu sendiri. Maka program-program yang diadakan harus sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Mengingat jumlah dana yang dialokasikan begitu besar. Total anggaran dana desa mencapai Rp. 4,7 triliun.

Masing-masing desa bisa mendapatkan dana sekitar Rp 800 juta. "Jangan sampai masyarakat di desa hanya jadi penonton saja," tandasnya.

Selain persoalan pengelolaan dana desa, dalam kunjungan kerja itu, Komisi V DPR juga membahas soal Pendamping Desa. Menurut Fary, pendamping desa harus paham betul karakter dan permasalahan yang ada di desa. Rekrutmen yang berlangsung pada bulan Januari lalu, diharapkan tidak hanya lulus karena memenuhi segala persyaratan.

"Jangan sampai pendamping desa yang lolos seleksi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni," katanya.

Politisi dari Partai Gerindra itu menilai keberadaan pendamping desa sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. "Tugas mereka memfasilitasi. Dana per desa sekitar Rp800 juta, jadi ini perlu pendampingan bagaimana mengelola dana tersebut," jelasnya.

Selain audiensi dengan pemerintah daerah setempat, rombongan Komisi V DPR juga meninjau Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan terkait pelaksanaan program dana desa, dimana di desa tersebut dana desa salah satunya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perbaikan jalan desa.

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastuti, M.Si

(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,

(DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Suratna, M.Si

(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti

(Kasubag Media Cetak)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,

Devi Iriandi, Hendra Sunandar,

Surahmad Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,

Jayadi Maulana, Arief Rachman,

R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

SIRKULASI

Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI**

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI**PIMPINAN PENERBITAN**

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP

(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE

(Kasubag Produksi),

Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si

(Kasubag Distribusi)

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

Email

penerbitandpr@gmail.com

(isi berita dan materi foto
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)

FADLI ZON DUKUNG BOIKOT PRODUK ISRAEL

Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 OKI di Jakarta Convention Center, yang akan memboikot produk-produk asal Negara Israel.

"Saya kira pidato itu harus kita apresiasi ya. Kalau memang pemerintah mau memboikot produk-produk Israel saya kira itu langkah yang bagus," ungkap Fadli kepada awak media di Ruang Tamu Pimpinan DPR RI, Selasa (8/3).

Meskipun demikian, Fadli menyarankan pemboikotan produk Israel dilakukan secara teliti. Pimpinan DPR Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini menilai, rencana pemboikotan ini sebagai bentuk komitmen untuk Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

"Tapi harus dijalankan, harus melalui suatu proses yang teliti, produk-produknya apa saja. Kalau itu mau dilakukan saya kira itu bagus-bagus saja, sebagai suatu bentuk komitmen untuk Palestina yang merdeka. Kalau itu dilakukan saya termasuk yang mendukung," tandas Fadli.

Politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini memaparkan pendapatnya, bahwa salah satu faktor perdamaian di Timur Tengah adalah dengan Pengakuan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat oleh Israel.

"Tapi dalam hal ini seharusnya pihak Israel mengakui Negara Palestina Merdeka. Dengan demikian akan terjadi perdamaian di Timur Tengah khususnya di Palestina," papar Fadli.

Fadli mengatakan, Negara Palestina merupakan tempat persemaian agama-agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Sehingga demi menjaga hubungan baik antara ketiga agama besar yang ada, maka Negara Palestina harus damai. Dia menambahkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina juga merupakan tanggung jawab negara-negara Asia-Afrika.

"Jadi kita harus mendukung upaya pemerintah yang menginginkan Palestina merdeka. Bahkan beberapa waktu lalu masyarakat telah



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

menyumbang pembangunan rumah sakit yang luas dan besar di Gaza. Itu salah satu bentuk konkret bahwa masyarakat Indonesia punya aspirasi dan dukungan pada Palestina," pungkas Fadli.

Presiden Joko Widodo mendorong negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel. Dorongan itu merupakan salah satu bentuk peningkatan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina.

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," ujar Jokowi dalam pidato penutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 OKI di Jakarta Convention Center, Senin (7/3) sore.



KETUA DPR RI DAN KETUA PARLEMEN ALJAZAIR SEPAKAT FOKUS KEMERDEKAAN PALESTINA

Kemerdekaan Palestina menjadi salah satu pembahasan saat Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan Ketua Parlemen Aljazair Mohamed Larbi Ould Khelifa di Ruang Delegasi Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Senin (7/03/2016). Dalam pertemuan itu, keduanya menyepakati beberapa hal, baik soal hubungan bilateral kedua negara, maupun mengenai kemerdekaan Palestina.

Akom, panggilan akrab Ade Komarudin menegaskan, untuk kemerdekaan Palestina memang dibutuhkan perhatian dari Indonesia dan Aljazair. Apalagi, tema ini juga menjadi tajuk utama di Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berlangsung pada Minggu-Senin, 6-7 Maret 2016 di Jakarta.

"Sesuai agenda KTT OKI, kami sepakat untuk sama-sama fokus penyelesaian masalah Palestina yang butuh perhatian," imbuh politisi F-PG itu.

Indonesia, lanjut politisi F-PG itu, pada pertengahan Maret 2016 ini akan membuka konsulat kehormatan di Ramallah, Palestina. Menurutnya, ini merupakan satu perkembangan yang luar biasa.

"KTT LB OKI ini tujuannya adalah untuk semakin mencari solusi, menyangkut soal masa depan Palestina. Dan ini memenuhi

permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abas, yang meminta pencarian solusi di OKI, demi masa depan mereka," kata Akom.



Ketua DPR Ade Komarudin

Akom melanjutkan, Indonesia dan Aljazair memiliki hubungan yang baik sejak cukup lama. Keduanya saling bertukar pengalaman soal pemerintahan dan parlemen di masing-masing negara. Ia tak memungkiri, Indonesia bisa mencontoh Aljazair terkait peranan perempuan di Pemerintahan maupun Parlemen.

"Kami tukar pikiran soal demokrasi di dua negara. Di sana, sangat besar peranan perempuan Aljazair, presentase mereka di Parlemen banyak. Emansipasinya berjalan dengan baik, dan mudah-

mudahan di negara kita juga demikian," harap Akom.

Dalam kesempatan itu, juga ada pembicaraan soal kunjungan balasan. Aljazair mengundang Presiden Joko Widodo dan juga DPR RI untuk bisa datang ke negara mereka.

"Beliau menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi dapat berkunjung ke Aljazair. Mereka juga mengundang kami untuk berkunjung ke Aljazair," jelas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Ketua Parlemen Aljazair Mohamed Larbi Ould Khelifa berharap, pertemuan ini dapat mempererat hubungan antara dua negara. Apalagi, hubungan kedua negara sudah dibangun sejak

Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955.

"Kita tahu hubungan bilateral dua negara sudah dibangun cukup lama. Ini menjadi landasan kerjasama yang kuat bagi kedua negara," kata Ketua Parlemen Aljazair.

Dalam pertemuan ini, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (F-PD) dan Fahri Hamzah (F-PKS), Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (F-PG), Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha (F-PPP) dan Dave Akbarshah Fikarno (F-PG).

AGUS HERMANTO DORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN BANDARA AHMAD YANI

DPR RI mendorong percepatan pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah supaya target pembangunan pada awal 2018 dicapai.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, seluruh kendala pengembangan bandara Ahmad Yani Semarang saat ini sudah tidak ada. Diharapkan proses pembangunan bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

"Targetnya masih 2018 awal beroperasi. Kita ke sini menguatkan agar target pembangunan yang sedang berjalan bisa tercapai," kata Agus Hermanto di sela-sela kunjungan di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/3/2016).

Bandara baru Ahmad Yani dikerjakan dalam empat tahap pembangunan. Tahap pertama berupa



Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto

pengerjaan lahan dan jalan akses yang dianggarkan sebesar Rp 286,4 miliar. Tahap kedua pengerjaan apron dan taxiway

dengan anggaran Rp 155,9 miliar. Proses ketiga berupa pembangunan terminal. Yang terakhir berupa pembangunan gedung penunjang dan pelengkap, seperti penginapan atau supermarket.

Bandara baru ini berdiri di atas lahan bekas rawa-rawa. Luas

terminal yang direncanakan seluas 40.900 meter persegi, apron pesawat 61.344 meter persegi, dan parkir seluas 43.500 meter persegi. Pimpinan Dewan dari FPD

sengaja mengunjungi bandara tersebut untuk memastikan tidak ada masalah dalam proyek pembangunan yang prosesnya sejak 2014 itu. Ia juga ingin menyerap aspirasi dari persoalan yang ada.

"Perjuangan pembangunan Bandara ini sudah sejak zamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Sekarang hasilnya sudah ada. Perencanaan dan pembangunan sudah mulai ada hasilnya, tapi memang belum selesai," kata dia.

Politisi dari Dapil Jateng itu mengatakan, pembangunan bandara baru penting untuk melengkapi kekurangan yang ada. Fasilitas di bandara sekarang ini dianggap tidak memadai sehingga perlu perbaikan secara menyeluruh.

as, Foto : agung sulistiono/parle/hr.

FADLI ZON TERIMA PENGHARGAAN BHAKTI KARYA NUSANTARA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima penghargaan Bhakti Karya Nusantara dari Raja Djelantik, Bali, Sabtu (5/3).

Penyerahan Peng-anugerahan Yang Berwujud Patung Gajah Mada Ini Diserahkan Oleh Putra Mahkota Anak Agung Ngurah Kakarsana (Putra Raja Djelantik) Kepada Fadli Zon Di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Bali.

Pemberian Penghargaan Bhakti Karya Nusantara Melibatkan Paiketan Puri Sejebag Jagad Bali Dengan Mengusung Spirit Persatuan Ala Mahapatih Gajah Mada.

"Gajah Mada Adalah Abdi Negara. Beliau Mampu Menyatukan Berbagai Pulau. Kini, Kita Prihatin Dengan Ketegangan Politik, Ekonomi Dan Segala Macam. Seakan Bangsa Kita Sudah Keluar Dari Nilai Leluhur. Bangsa Yang Luar Biasa, Tapi Besar Masalah Yang Dihadapi," Tutur



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Putra Mahkota Anak Agung Ngurah Kakarsana.

Perwakilan Dari Berbagai Kerajaan Di Indonesia Juga Turut Hadir Menyaksikan Pemberian Penghargaan Ini. Antara Lain, Keraton Solo, Kerajaan Bulungan Kalimantan, Dan Kerajaan

Seledendeng Lombok.

Fadli Zon Dalam Sambutannya Mengucapkan Terimakasih Dan Berharap Spirit Persatuan Gajah Mada Tetap Terus Bergelora Dalam Darah Dan Nafas Setiap Anak Bangsa. Spirit Gajah Mada Dalam Mempersatukan Nusantara Salah Satunya Bisa Dilakukan Oleh Generasi Penerus Bangsa Dengan Cara Mencintai Keanekaragaman Budaya Bangsa.

"Kebudayaan Mengikat Kita Sebagai Sebuah Bangsa. Karena Itu, Bangsa Yang Beradab Adalah Bangsa Yang Menghargai Kebudayaannya" Ujar Fadli Zon.

Di Sela-sela Acara, Fadli Zon Juga Diajak Putra Mahkota Anak Agung Ngurah Kakarsana Melihat Topeng Gajah Mada Yang Sangat Disakralkan Di Puri Ageng Blahbatuh.

Hmd, Mp, Foto : hamdis/parle/hr.



PT GEO DIPA ENERGY DIMINTA TAMBAH KAPASITAS PLTPB DIENG

Dalam kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan ditargetkan sebesar 23% pada tahun 2025.



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tinjau PLTPB Dieng, Jateng

Indonesia memiliki potensi energi panas bumi sebesar 40% dari seluruh potensi panas bumi di dunia dan salah satunya ada di Jawa Tengah, dengan potensi 300 MW.

Melihat potensi itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta kepada PT.

Geo Dipa Energy untuk mengoptimalkan dan menambah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Dieng, sehingga target penambahan pembangkit listrik dari Pemerintah akan tercapai.

"Upaya-upaya optimalisasi sumber

panas bumi harus terus dilakukan untuk mengejar target pengembangan PLTPB sebesar 3.583 MW sampai dengan 2020, sehingga target total 35.000 MW dari Pemerintah akan tercapai apabila pembangunan infrastruktur dan kapasitas dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ditingkatkan," kata Politisi Partai Demokrat, saat meninjau PLTPB Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (2/3/2016).

Berdasarkan data, Rasio Elektrifikasi (RE) di Jawa Tengah per Januari 2016 telah terealisasi sebesar 91,1%, namun bauran energi belum maksimal. Data hasil evaluasi bauran energi pada tahun 2015 menunjukkan energi dan terbarukan (EBT) hanya mencapai 7,8% dari target sebesar 9,38% dan panas bumi sendiri baru menyumbang 0,39%.

Menurut Agus Hermanto, untuk mencapai target bauran 2018 yang sebesar 10,36% perlu dioptimalkan dan direalisasikan rencana penambahan kapasitas pembangkit dari PLTPB Dieng.

"DPR akan mengakomodir dan memberikan dukungan dalam pengelolaan PLTPB Dieng guna mencapai target kemandirian energi baru dan terbarukan, serta memberikan manfaat bagi sektor-sektor padat karya UMKM sekitar," tegasnya.

as, Foto: agung/parle/hr.

KOMISI V DUKUNG SATU DESA SATU PENDAMPING

Komisi V DPR RI berkomitmen untuk mengawal percepatan pembangunan desa dengan melaksanakan kunjungan kerja spesifik mengenai program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa ke Kabupaten Kubu Raya, Senin 7/3/2016.

"Tujuan kami ke Kubu Raya ini untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pembangunan dan pemberdayaan desa. Dari hasil kunjungan ini kita akan menyerap langsung aspirasi dari masyarakat, pemerintah desa dan daerah dan akan kita giring percepatan pembangunannya di pusat," kata Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V Lasarus, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Tim Komisi V DPR bertemu Bupati



Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Lasarus Bersama Bupati Kubu Raya Rusman Ali

Kubu Raya Rusman Ali beserta jajaran Pemkab dan Pemprov Kalbar yang juga mengundang sejumlah kepala desa dan camat sebagai perwakilan pemerintah daerah setempat untuk mengikuti dialog bersama Komisi V DPR RI dan Perwakilan Kementerian PDT.

Kepala Desa Padang Tikar Dua, Efendi Senong menyambut baik peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di pedesaan. Namun dia menyayangkan karena hingga saat ini jumlah tenaga pendamping desa di Kubu Raya masih minim. "Saat ini yang saya lihat masih ada 1 tenaga pendamping desa yang menangani 4 desa, jika hal ini terus dibiarkan maka pendampingan di setiap desa menjadi tidak optimal. Idealnya 1 desa bisa mendapatkan 1 tenaga pendamping desa," ujarnya.

Dengan bertambahnya jumlah tenaga pendamping desa, Efendi berharap ke depan akan lebih optimal dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat desa. "Jika potensi sumber



daya manusia tingkat desa sudah maksimal otomatis juga mendorong percepatan pembangunan di desa," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Lasarus yang merupakan legislator Dapil Kalimantan Barat ini menyatakan akan berupaya mengakomodir semua usulan yang diutarakan setiap kepala desa termasuk camat di Kubu Raya. "Komisi V memang sedang mengadakan evaluasi mengenai perekrutan tenaga ahli pendamping desa ini, bahkan kemarin

sudah rapat dengan Kementerian PDT dan kemungkinan kami akan membentuk semacam Panja," ungkap Lasarus.

Panja ini sebagai wujud tindak lanjut kewenangan pengawasan DPR terhadap perekrutan tenaga pendamping desa. "Bagaimana efektivitas 1 tenaga pendamping untuk 4 desa, apalagi di Kalimantan yang jarak antar desa jauh dengan kondisi geografis sangat berat yang sangat berpengaruh terhadap besarnya biaya transportasi serta waktu," jelasnya.

Pada intinya, komposisi yang ideal memang satu desa satu pendamping, karena satu pendamping menangani empat desa itu sulit, apalagi NKRI terdiri dari desa-desa yang penyebaran penduduk pelosok luas dengan medan yang berat. "Jadi kami di Komisi V tegaskan pasti akan setuju kalau memang nanti pemerintah akan mengusulkan anggaran tambahan untuk mewujudkan satu desa satu pendamping, supaya program percepatan pembangunan desa berjalan lancar," pungkasnya.

ran, Foto : riska/parle/hr

STASIUN TV LOKAL DIMINTA PRIORITASKAN KEARIFAN DAN BUDAYA LOKAL

Anggota Komisi I DPR RI, Supiadin Aries Saputra mendorong agar stasiun TV lokal lebih memprioritaskan kearifan dan budaya lokal agar tak kalah saing dengan TV Nasional serta bisa memberikan daya tarik khusus kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan saat Komisi I DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan Indonesia Cable Television Association (ICTA) di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (08/03).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, Supiadin berharap TV Lokal memprioritaskan kultur lokal dan kearifan lokal. Nah ini juga terkait kreatifitas agar TV Lokal bisa lebih menarik dibanding TV Nasional. "Silahkan bersaing secara bebas dan profesional, jangan sampai nanti TV Lokal mati karena tak ada masyarakat lokal yang nonton akibat tidak ada konten siaran yang memberikan daya tarik khusus," ujar politisi Partai Nasional Demokrat ini.

Lebih lanjut ia menyatakan, misalnya di daerah Garut, bagaimana TV Lokal disana bisa menyiarkan cerita Gunung Tangkubanperahu, Sangkuriang atau Prabusiliwangi. Ini penting agar TV Lokal punya ciri khas. Pihaknya menaruh atensi ini, karena jika TV Lokal tak mengangkat kearifan lokal maka tidak ada bedanya

dengan TV Nasional, karena saat ini banyak kearifan lokal yang sudah hilang.

Hal ini harus menjadi perhatian bersama, karena TV Lokal bisa dijadikan identitas daerah dan belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dalam kasus di Garut misalnya, ada stasiun yang bernama 9 TV dan sudah bertahun-tahun menjalani masa percobaan. Supiadin juga menyoroti mengapa perijinan penyiaran di Indonesia begitu susah dan memakan waktu yang lama.

"Di daerah Garut ada stasiun bernama 9 TV yang sampai saat ini masih menjalani masa percobaan. Padahal sudah hampir 3-4 tahun. Waktu yang lalu saya tanya ternyata sudah terjadi perubahan dari analog ke digital. Dia ajukan digital dan ternyata itu lagi ada persoalan di MA. Karena UU Penyiaran tentang sistem digital belum turun, sementara dia wajib menggunakan TV digital. Nah kalau begini bagaimana perijinannya? Di satu sisi revisi UU Penyiaran belum selesai dan aturan sistem digital belum ada. Tapi TV sedang butuh siaran dan ijin tidak keluar. Mengapa kok ijin kita begitu susah?," tanya Supiadin.

Dia mengaku begitu sangat memanfaatkan TV Lokal ketika mengunjungi daerah-daerah. "Saya kebetulan sering turun ke Dapil dan selalu menggunakan TV Lokal untuk berhubungan

dengan masyarakat. Saya merasa tak mungkin mengunjungi 1000 desa dalam 5 tahun. Jadi alternatifnya saya gunakan TV Lokal," tuturnya.

Selain itu, Supiadin juga mempertanyakan proses perijinan penyiaran yang sangat lama sehingga membuat TV Lokal begitu lama menjalani masa percobaan. "Terkait TV yang masih dalam masa percobaan maka iklannya pun juga tak berbayar. Kalau minta bayaran ya bisa kena dia, bagaimana bisa TV yang belum berijin kok sudah minta bayaran kepada pemasang iklan. Padahal animo orang untuk pasang iklan itu luar biasa," tegasnya.

"Saya meminta KPI untuk bisa memperpendek proses perijinan itu. Di Amerika tak ada tuh ijin yang sampai bertahun-tahun. Akibat birokrasi dan perijinan yang panjang maka cost yang dikeluarkan juga besar," pungkask anggota DPR Dapil Jawa Barat XI ini.

hs,mp, Foto:andri/parle/hr



Anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra



KOMISI I BERHARAP KPI TAK LANJUTKAN UJI PUBLIK

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz berharap KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) tidak melanjutkan uji publik terhadap perpanjangan izin 10 stasiun televisi swasta di Indonesia.



Hal tersebut diungkapkan kepada wartawan sesaat sebelum berlangsung rapat di Komisi I, Senayan Jakarta, Selasa (8/3).

"Saya berharap KPI tidak melanjutkan lagi uji publik tersebut, dan sepertinya memang sudah tidak dilanjutkan lagi. Karena uji publik yang dilakukan KPI kemarin itu sifatnya hanya sewaktu-waktu atau tidak terus

menerus. Ada yang diuji publik saat akhir-akhir saja, sementara saat awal tidak dilakukan hal itu. Sementara evaluasi terhadap stasiun ini kan sepuluh tahunan. Kalau mau dilakukan uji publik ke depan, aturannya harus dibuat dengan jelas termasuk dalam hal waktu uji publik tersebut," ujar Meutya.

Selain itu lanjut Meutya, metodologi yang digunakan KPI pun tidak jelas, termasuk yang berpartisipasi dalam uji publik tersebut. Misalnya siapa saja respondennya, apa ada KTP nya dan sebagainya. Sehingga ia khawatir jika dalam uji publik tersebut ada sebuah rekayasa.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidiq juga telah meminta KPI untuk tidak melakukan uji publik terhadap perpanjangan izin 10 stasiun televisi. Karena selain metodologinya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, juga tidak memiliki dasar hukum. Dikatakan Politisi dari fraksi PKS, Izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz

ayu. Foto: andri/parle/hr.

PEMERINTAH DIMINTA KONSISTEN TINDAKLANJUTI HASIL UKG

Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan Bulan November 2015 lalu merupakan tolak ukur pencapaian kompetensi yang dimiliki guru dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Rancangan tindak lanjut dari hasil tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan mutu dan kapasitas guru di tengah segala tantangan, dinamika dan problematika yang dihadapinya.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi X DPR, Nurhasan Zaidi, usai RDP dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Selasa (8/03/2016). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, Ferdiansyah (F-PG).

"Tantangan terbesar dalam



Anggota Komisi X DPR Nurhasan Zaidi

pelaksanaan tindak lanjut hasil UKG ini adalah konsistensi dan komitmen serta kontrol kualitas dari Pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut," tegas

Zaidi.

Politisi F-PKS itu memaparkan, hal ini didasarkan fakta bahwa konsep program Guru Pembelajar dengan tiga jenis dan model tindak lanjut yakni Pendidikan dan Latihan (Diklat) tatap muka, daring (online) dan Kombinasi, memiliki kompleksitas mekanisme dan tantangan yang beragam, belum lagi kriteria peserta dan indikator keberhasilan dari masing-masing model tindak lanjut ini berbeda.

"Desain global program Guru Pembelajar sebagai tindak lanjut hasil UKG harus dipersiapkan hingga tataran teknis yang sedetail-detailnya agar tidak terjadi miss di lapangan dan terlaksananya target yang ingin di capai." ujar politisi F-PKS itu.

Zaidi juga meminta realisasi dari Pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada 118.444 orang guru yang mendapatkan nilai UKG diatas 81, dari seluruh peserta sebanyak 91,51 guru dari total seluruh guru yang terdaftar dalam dapodik.



"Kita berharap dengan konsistensi dan komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam program ini, pendidikan di Indonesia dapat terus maju dengan meningkatnya kompetensi, mutu dan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan di Indonesia. Selain itu komitmen,"

harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu dalam paparannya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapratna mengatakan, pihaknya telah melaksanakan UKG pada November 2015, dengan peserta sebanyak 2,699

juta guru. Uji menggunakan komputer, sehingga soal yang diujikan berbeda-beda antar peserta.

"Hasilnya, sebelumnya hanya 47, tapi sekarang menjadi lebih baik, yakni 56 persen. Sebenarnya, guru itu pintar, tapi cara menyampaikannya belum baik," nilai Sumarna.

sf. Foto: Azka/parite/hr.

KESEJAHTERAAN GURU HONORER MASIH DIPANDANG SEBELAH MATA

Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore menilai, Pemerintah masih memandang sebelah mata kesejahteraan guru honorer. Padahal, guru memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pendidikan Indonesia.

"Bagaimana kita mau menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar, jika



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore

banyak guru honorer yang masih susah. Kita tidak mungkin memaksakan kepada guru honorer itu," kata Jefri, di sela-sela RDP dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Selasa (8/03/2016).

Politisi F-PD itu menegaskan, Pemerintah harus memperkuat sumber daya manusia (SDM) guru, melalui berbagai pelatihan. Guru-guru juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya, dengan adanya kesempatan mendapatkan beasiswa.

"Jika guru-guru tidak diperhatikan, kualitas pendidikan kita hancur. Kita tidak sanggup menghadapi persaingan bebas," khawatir Jefri.

Jika kesejahteraan guru mendapat perhatian, dan SDM guru juga semakin

kuat, politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu yakin, kualitas pendidikan semakin baik. Menurutnya, anak-anak jadi memiliki landasan yang kuat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

"Guru honor itu sangat penting, tapi kita kurang menghargai mereka. Guru bisa menjadi landasan yang kuat bagi anak didiknya. Anak-anak dapat menjadi baik jika landasannya juga baik," imbuah Jefri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata mengatakan, saat ini tenaga honorer guru sebanyak 1,163 juta. Untuk mengangkat tenaga honorer KII ini, tidak dapat diangkat secara langsung sebagaimana amanat UU Aparatur Sipil Negara.

Ia menjelaskan, sebetulnya ada kenaikan insentif guru honorer pada tahun ini. Tahun ini, insentif guru sebesar Rp 389 miliar, dibanding tahun lalu hanya sebesar Rp 155 miliar.

"Kami juga memiliki Program SM3 T untuk guru garis terdepan. Sebanyak 3000 orang dengan anggaran 107 miliar pada tahun 2016. Dimana pada tahun 2015 hanya nol anggaran," jelas Sumarna.

sf. Foto: Azka/parite/hr.

KUALITAS FILM BURUK KARENA TAK ADA ATURAN

Ketua Panja RUU Perfilman DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengakui jika semrawutnya dunia perfilman baik di layar lebar maupun televisi, karena selama ini tidak ada aturan atau landasan hukum yang menaunginya. Menurutnya, Undang-undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang hingga saat ini

belum memiliki Peraturan Pemerintah-nya, perlu direvisi.

"Kalau film kita dibiarkan tanpa aturan, maka budaya Indonesia akan habis. Apalagi tanpa pembatasan investasi asing, maka akan makin terpuruk," tegas Kharis pada diskusi Forum Legislasi tentang RUU Perfilman bersama aktor dan produser

film Dede Yusuf dan pengamat film Yan Wijaya di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Selasa (8/3/2016).

Ironisnya lagi, tambah politisi PKS itu, jumlah bioskop yang ada di tanah air kini semakin berkurang, hingga hanya tersisa 13 persen. Itu pun hanya di kota-kota besar, sedangkan di daerah sudah habis. Padahal, banyak budaya daerah Indonesia yang sangat kaya dan beragam, tapi belum seluruhnya diangkat ke layar lebar.

"Persoalan di daerah selama ini adalah pajak untuk hiburan itu besar, yaitu sampai 38 persen. Akibatnya pengusaha film terkonsentrasi di kota-kota besar. Sebab,



kalau di daerah merugi," tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Dede Yusuf mengakui jika kini kualitas film lokal mengalami penurunan. Sehingga wajar kalau waktu tayang film lokal di bioskop hanya selama 3 hari, berbanding terbalik dengan film-film asing. Namun ada indikasi juga, masyarakat tidak mau nonton film Indonesia.

"Film kita dihadapkan pada film streaming melalui pencarian bakat yang tayang sejak pagi sampai tengah malam bahkan dini hari. Itu, hanya untuk kejar rating, sehingga produser film tak tertarik membuat film karena pasti merugi. Maka mau menjadi apa film kita? Kreatifitas pun sudah tidak terbentuk," kata Dede

Sebagai pelaku perfilman yang juga Ketua Komisi IX DPR RI itu menambahkan, sebenarnya produser bisa membuat film yang bagus, namun terbentur dengan anggaran, karena pemerintah tak memberikan film.

"Banyak film yang diproduksi, namun yang masuk box office sangat kecil.



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf didampingi Ketua Panitia RUU Perfilman Abdul Kharis Alamsyah.

Demikian pula film Amerika Serikat, tidak semua masuk box office. Karena itu, kita harus menaikkan rating ke box office. Kita bisa buat film bagus, tapi tidak punya dana," ungkap politisi F-PD itu.

Dengan demikian, kata Dede, selama negara tidak memberikan intervensi kepada film, maka para produser hanya akan mencari untung dan hidupnya tergantung rating, tanpa adanya kualitas. Bahkan, produser yang hebat pun akan

mengikuti arus ini.

"Kita ingin film Indonesia ini mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Tapi, kalau tanpa intervensi pemerintah, ya akan seperti ini terus. Banyak film diproduksi hanya dengan dana Rp 500 juta malah ada yang Rp 100 juta," imbuhnya.

Seharusnya, kata politisi asal dapil Jawa Barat itu, seharusnya film itu dijadikan alat propoganda negara seperti Amerika Serikat, India, China, Rusia, Eropa, dan negara asing lainnya.

Dibalik adanya penurunan kualitas film, Yan Wijaya menilai malah ada peningkatan kuantitas produksi film dari tahun ke tahun. Seperti di tahun 2011 hanya ada 77 judul film, 2011 sebanyak 85 judul film, 2012 hanya 91 judul film, 2013 sebanyak 109 judul film, tahun 2014 117 film dan tahun 2015 terdapat 130 judul film.

"Memang sulit menarik penonton sebanyak 50 ribu, apalagi sejuta orang. Padahal, kalau penontonnya banyak, maka produser akan mengantongi keuntungan yang banyak pula," katanya.

Foto: anetri/pante/hr

KONTRAK HABIS, NASIB PENDAMPING DESA DIUJUNG TANDUK



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR di kantor Gubernur Jambi

Nasib para pendamping desa yang akan habis kontraknya pada bulan Maret ini menjadi salah satu tema yang mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli didampingi Wagub Fachrori Umar, Kapolda Brigjen Pol Musyafak,

Danrem 042 Garuda Putih Kol Inf Makmur, Kepala Instansi terkait dana desa serta pendamping desa dari 3 kabupaten perwakilan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (7/3/2016).

Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena hadir dalam rangka Peninjauan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) di Provinsi Jambi.

"Kami hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat desa di provinsi Jambi," ungkap Michael dalam sambutannya. Lebih lanjut

politisi demokrat ini akan meneruskan semua aspirasi terkait dana desa dan menjadi bahan masukan saat rapat kerja dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.

Selain masalah kontrak yang akan habis, para Pendamping Desa (Pendes) yang sebagian besar adalah mantan pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di era Presiden SBY lalu, mengadukan adanya isu bahwa personel eks PNPM tidak akan digunakan lagi setelah Maret 2016.

Bahkan, Marsono, salah satu perwakilan pendamping desa mengaku belum menerima honor (gaji) selama 2 bulan terakhir.

"Kami mohon bapak-ibu dari Komisi V DPR agar menyuarakan nasib kami ini kepada Pak Menteri secepatnya," harap



lelaki paruh baya itu diikuti tepuk tangan dukungan dari sesama pendamping desa

Tidak sampai disitu, pendamping desa Akmal mengaku kecewa dengan sistem kontrak yang dicicil. "Kami awalnya dikontrak sampai Oktober lalu diperpanjang ke Desember diperpanjang lagi sampai Maret ini, kenapa bisa dicicil begini? ungkapnyanya dengan raut muka kecewa.

Ia juga menjelaskan jika para pendamping desa di tingkat kabupaten tidak memiliki kantor yang jelas. "Para Pendes tingkat Kecamatan kebanyakan gabung di Kantor Kecamatan, sedangkan kita yang di Kabupaten belum jelas berkantor dimana," ungkap Akmal.

Mendengar berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Jambi Zumi Zola berharap agar Komisi V DPR RI memperjuangkannya terkait pelaksanaan dana desa.

Zola menyatakan penyaluran dan pencairan dana desa (dari APBN) di Provinsi Jambi berjalan baik dengan total alokasi mencapai Rp 381,56 miliar telah disalurkan ke rekening desa sebesar Rp 366,81 miliar.

Ikut serta dalam Kunspek tersebut Michael Wattimena (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi V), Sadarestuwati, Yoseph Umarhadi, Andi Iwan Darmawan Aras, Novita Wijayanti, Willem Wandik, H.A. Bakri dan Nurhayati.

KOMISI III NILAI ADA KEJANGGALAN DI DEPONERING KASUS AS DAN BW

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menduga ada unsur tertentu alam deponering kasus dua mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima masukan dari Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (FMPPH) di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, Senin (7/3).

"Kami tidak menemukan alasan logis atas deponering dua kasus tersebut. Kami menilai hal itu tidak layak. Apa tujuan jaksa melakukan itu," ujar Desmond.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi Partai Gerinda itu mengatakan bahwa deponering itu telah mendegradasi wibawa kepolisian. Oleh karena itu, Komisi III akan mengkaji secara akademis, kemudian dalam waktu dekat juga akan memanggil Jaksa Agung.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil dari Fraksi PKS misalnya. Nasir mengatakan sejak awal Jaksa Agung menyatakan kesiapannya



Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa

melanjutkan dua kasus itu ke pengadilan. Namun belakangan kenyataannya dikeluarkan deponering. Atas dasar itulah pihaknya menilai pemberian deponering itu sebagai sebuah kejanggalan.

Ke depan, tambah Nasir, perlu dicermati UU Kejaksaan, agar jangan sampai ada kewenangan yang diimplementasikan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu pihaknya akan meminta penjelasan langsung dari Jaksa Agung, yang sekaligus dapat menjawab pertanyaan publik atas deponering dua kasus tersebut.

Foto: andri/parite/hr.

Foto: andri/parite/hr.

IURAN BPJS KESEHATAN TAK SEBANDING DENGAN PELAYANAN

Panja BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada Ketua Tim Tarif Kementerian Kesehatan (Donald Pardede), Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan (Maya A Rusady) dan Prof. Dr Budi Hidayat (pakar UI), atas masukan mengenai masalah Indonesia Case Base Group (INA CBGs).

"Masukan tersebut akan menjadi referensi Panja BPJS Kesehatan dan PBI Komisi IX DPR dalam menyusun rekomendasi" ujar Wakil Ketua Komisi IX Ermalena saat RDP di Gedung DPR,

Jakarta, Senin (07/3).

Lebih lanjut Erma meminta kepada tim terkait untuk melakukan perhitungan kembali mengenai iuran BPJS Kesehatan, agar angka-angka ini masih bisa ditekan, misalnya dilihat dari persebaran penduduk dan pelayanan yang diberikan.

Senada dengan Erma, anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menanyakan mengenai besaran iuran BPJS Kesehatan yang tidak sebanding dengan layanan yang diterima masyarakat.

Ribka mempertanyakan mahalnya dana iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000. total biaya

iuran yang dibayarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan kemudahan akses yang diperoleh masyarakat.

"Dulu askes (asuransi kesehatan) kita hanya bayar sekitar Rp 5.000 tapi biaya operasi sebesar Rp 350 juta tetap lancar tanpa adanya kesulitan. Sekarang dengan biaya yang lebih mahal kenapa prosesnya justru berbelit,"ujarnya. Untuk itu, BPJS diharapkan dapat kembali melakukan tinjauan tentang kebermanfaatan dan besaran iuran yang saat ini telah ditetapkan.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena

Foto: jayadi/parite/hr.



KOMISI VIII PERJUANGKAN KND DALAM RUU PENYANDANG DISABILITAS

Komisi VIII DPR RI memperjuangkan Komisi Nasional Disabilitas (KND) keberadaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, yang sedang dibahas antara DPR RI bersama Pemerintah.

Anggota Komisi VIII Desy Ratnasari menjelaskan KND merupakan suatu kelembagaan untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan advokasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Komisi VIII



Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari

memperjuangkan apa yang diharapkan aspirasi penyandang disabilitas dapat diwujudkan.

"Komisi VIII menginginkan KND itu ada, KND memiliki wewenang dan fungsi yang sangat dibutuhkan penyandang disabilitas saat ini, karena pemenuhan penyandang hak-hak penyandang disabilitas belum sesuai dengan yang diinginkan oleh penyandang disabilitas, misalnya fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, peluang pekerjaan, sehingga mereka bisa mandiri untuk masa depannya," kata Desy Ratnasari, disela Rapat Panitia Kerja RUU tentang Penyandang Disabilitas, Senin (7/3/2016).

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, karena para penyandang disabilitas merasa belum ada keberpihakan kebijakan untuk penyandang disabilitas. Dimasukkannya KND dalam RUU Penyandang Disabilitas, agar hak-hak penyandang disabilitas betul-betul dilaksanakan oleh Pemerintah, yang dituangkan dalam dalam beberapa pasal.

"Komisi VIII merasa hal ini harus dituangkan dalam RUU untuk memiliki jaminan pembentukan KND dilaksanakan

oleh Pemerintah. Presiden juga bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang KND, sehingga yang menjadi aspirasi dari penyandang disabilitas terpenuhi dan Komisi VIII memiliki jaminan untuk dipertanggungjawabkan kepada penyandang disabilitas untuk ini betul-betul bisa dilakukan," katanya.

Hal ini merupakan suatu hal yang peting karena ini juga merupakan perbaikan dari UU yang sebelumnya UU No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini menjadi amanah dari ratifikasi tersebut yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan KND yang merupakan sebuah badan yang melindungi hak penyandang disabilitas.

"KND akan menjadi wadah dimana ketika penyandang disabilitas merasa tidak terpenuhi hak-haknya, dapat mengadukannya yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KND," ungkap Desy Ratnasari dapil Jawa Barat IV.

as, Foto:kresno/parle/hr

KAUM MUDA HARUS DIAJAK BERKONTESTASI POLITIK

Kaum muda merupakan bonus demografi tersendiri dalam negara demokrasi. Kelompok masyarakat ini menjadi tumpuan demokrasi masa depan.

Untuk itu, mesti dibukakan ruang seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk "Rejuvenating Democracy, Giving Voice to Youth" yang

digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) lewat Focus Group Discussion (FGD), Selasa (8/3). Hadir membuka acara sekaligus memoderatori diskusi tersebut, Wakil Ketua DPR RI



Wakil Ketua DPR Fadli Zon



Fadli Zon. Ada tiga pengamat politik yang membincang tema ini, yaitu Maswadi Rauf (Guru Besar FISIP UI), Siti Zuhro (peneliti LIPI), dan Ikrar Nusabakti (peneliti LIPI).

Fadli menyampaikan bahwa BKSAP sangat berkepentingan menerima banyak masukan dari para pembicara sebagai bahan rujukan untuk menghadiri sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 134 di Zambia pada 19-23 Maret 2016 nanti. Sidang IPU itu juga mengangkat tema demokrasi dan kaum muda, sebuah tema yang kali pertama diangkat di forum parlemen internasional. Kelompok-kelompok muda, kata Fadli, harus diberi pengetahuan yang cukup lewat pendidikan politik agar mau berkecimpung dalam dunia politik.

Maswadi Rauf berpendapat, karakteristik pemuda selalu ingin menjadi pelopor perubahan. Di Indonesia, pelopor proklamasi adalah kaum muda. Tumbangnya Orde Lama dan Orde Baru juga dipelopori kaum muda. Hanya saja, benturan kerap terjadi antara karakteristik pemuda dengan ketentuan demokrasi.

"Salah satu keluhan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia adalah terjadinya banyak demo yang sebagian besar dilakukan oleh pemuda yang disertai dengan kekerasan fisik," ujar Maswadi. Sementara itu, Siti Zuhro mengatakan, DPR perlu merespon suara kaum muda untuk perbaikan demokrasi ke depan. Untuk itu, para elit politik dituntut memberi teladan terbaik bagi kaum muda bagaimana berdemokrasi yang sehat.

"Orang-orang muda adalah simpul demokrasi dan demokrasi harus memberi ruang kepada semua elemen untuk ikut kontestasi politik," kata Zuhro. Dia menambahkan, diperkirakan ada 30% (54 juta) pemilih pemula atau muda yang memberikan hak suaranya di Pemilu 2014. Demografi seperti itu cukup signifikan untuk memengaruhi Pemilu. Para pemuda biasanya sangat cerdas, kritis, responsive, dan teliti dalam bersikap.

mh, Foto: Jaka Nugraha/parle/hr

BUMN PERTANIAN PERLU BELAJAR PADA PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL

BUMN sektor pertanian seperti PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri perlu banyak belajar dari perusahaan swasta nasional PT. Agri Makmur Pertiwi.

Dasalnya, dengan modal awal yang tidak terlalu besar, perusahaan swasta ini mampu memenuhi kebutuhan petani akan benih unggul pangan dan hortikultura dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus.

"PT. Agri Makmur Pertiwi ini bisa menjadi inspirasi dan tolak ukur keberhasilan perusahaan BUMN kita. Sehingga, pada saat komisi IV memberikan dana tambahan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN terkait, pencapaian keberhasilannya harus melebihi dari PT Agri Makmur Pertiwi" kata Henky Kurniadi saat diwawancarai di area PT. Agri Makmur Pertiwi, Kediri, Jawa Timur, Jumat (4/3).

Selain itu, pemilihan lokasi PT. Agri Makmur Pertiwi cukup cerdas, berdiri dilahan yang subur, sumber daya manusia yang kreatif, bahkan perusahaan ini dapat memberikan sumbangan pajak mencapai 10 milyar. " Menurut saya, untuk wilayah sebesar Kediri, angka sumbangan pajak senilai 10 milyar ini sudah cukup tinggi " ujar politisi F-PDIP ini.

Ia menambahkan, walaupun perusahaan swasta ini

terdapat investasi asing, Namun, struktur modal diatur 100 persen milik dalam negeri, terbukti seluruh karyawan disini seluruhnya asli pribumi. Hal lainnya, perusahaan ini memiliki Research and Development (R&D) yang kuat, mereka mempunyai laboratorium dataran rendah, menengah dan tinggi. Sebelum bibit dilepas dipasar, ada pengujiannya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota komisi IV Taufiq R Abdullah mengatakan, tidak berkembangnya perusahaan BUMN ini bukan persoalan teknis, tapi mental perusahaan BUMN yang harus memiliki jiwa kewirausahaan, jangan mental pegawai.

"Saya kira komisi IV sudah memberikan dukungan maksimal dengan memberikan dana tambahan PMN sekitar 300 milyar, lebih banyak 2 kali lipat dari modal perusahaan swasta PT. Agri Makmur Pertiwi. Menurut saya tidak ada alasan lagi perusahaan BUMN sektor pertanian kita tidak maju" tekan politisi F-PKB ini.

Sementara itu, Junaidi Sungkono, Direktur Utama PT Agri Makmur Pertiwi (AMP) berpendapat, Indonesia negara pertanian tetapi perkembangan perusahaan benihnya masih banyak dipelopori perusahaan multinasional. Karena itu, ia bertekad mengembangkan perusahaan benihnya sampai berskala besar dan menjadi penyeimbang perusahaan-perusahaan benih multinasional.

"Dengan menjadi penyeimbang, akan terjadi keseimbangan harga benih, mutu produk, jaminan ketersediaan, maupun variasi pilihan sehingga menguntungkan bagi petani," ungkap mantan petinggi salah satu perusahaan benih multinasional ini.



Anggota Komisi IV DPR Henky Kurniadi

jk,mp, Foto: Jaka/parle/hr



RAPAT DITUNDA, KOMISI VIII KECEWA LAPORAN KEUANGAN DIRJEN PHU

Komisi VIII DPR kecewa terhadap laporan keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (Dirjen PHU Kemenag), yang disajikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2015. Akhirnya rapat ditunda hingga dilengkapinya laporan keuangan tersebut.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan yang membuat kecewa lantaran laporan Keuangan tidak disampaikan secara lengkap dan detail. Anggaran Dirjen PHU Kemenag Tahun 2015 sebesar Rp.1.085 Triliun, sedangkan laporannya hanya 18 lembar.

"Surat undangan Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Komisi VIII kepada Dirjen PHU telah disampaikan 18 Februari 2016, sekarang 7 Maret, ada 3 minggu lebih surat disampaikan, sangat disayangkan laporannya tidak memuaskan. Dari penampilan saja tidak yakin saya, anggaran 1 triliun lebih laporannya seperti ini. Hanya 18 halaman termasuk cover. Padahal waktunya 3 minggu untuk ini," katanya, saat Komisi VIII RDP dengan Dirjen PHU Kemenag dan jajarannya, Senin (7/3/2016).

Saleh menginginkan laporan keuangan ini dibuat secara lengkap misalnya layanan haji dalam negeri mestinya diuraikan, kemudian belanja layanan haji luar negeri diuraikan. Pembinaan haji dan umrah apa



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

saja itemnya. "Jangan kalau datang ke DPR meminta anggaran terus, sementara kegunaannya kita tidak tahu," tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini membenarkan bahwa yang tidak boleh Komisi VIII tahu, menurut Mahkamah Konsultasi (MK) adalah rincian satuan tiga pada saat pembahasan anggaran yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Tetapi sebagai pengawas perwakilan rakyat Indonesia di sini tentunya harus tahu kemana uang rakyat itu dipakai secara detail.

"Bukan hanya misteri tapi misterius. Saya anggap tidak ada keseriusan di Kementerian Agama dengan pola-pola seperti ini," tandasnya.

Lebih lanjut, diungkapkan dari anggaran sebesar Rp.1,085 Triliun anggaran, yang terserap hanya Rp.849 Milyar. Semestinya menurut Saleh, sisa anggaran Rp.200 Milyar tersebut bisa digunakan dari APBN untuk membiayai

kebutuhan jamaah yang Non APBN. Tetapi Kementerian Agama tidak mau menggunakan itu bahkan tahun ini tidak dianggarkan.

Selain itu, adanya catatan blokir pada anggaran revitalisasi asrama haji sampai dengan pertengahan Maret 2015, mengakibatkan tidak dapat dicairkannya anggaran dalam kurun waktu tersebut. Berdasarkan temuannya dalam Kunker Komisi VIII ke berbagai daerah bahwa proyek revitalisasi asrama haji sampai saat ini belum dikerjakan, jadi akan berpotensi tidak akan terlaksana juga pada tahun ini.

"Ada beberapa pekerjaan lelang yang diulang, berarti tidak keseriusan Kementerian Agama untuk melaksanakan proses lelang.sehingga tidak terserap," katanya.

Kembali dia mengungkapkan kekecewaannya, karena kendala-kendala penyerapan dituliskan dalam 1 lembar dengan 5 poin, yang membuat tidak percaya dengan laporan seperti ini.

"Saya usul ini jangan diterima sebelum ini lengkap, saya tidak suka dengan laporan seperti ini. Laporannya harus dirinci secara jelas. Saya minta rekomendasi rapat dibatalin dulu, sampai diperbaiki laporan ini. Saya usul laporan dibuat lengkap. Kemana saja uang rakyat itu dipakai, berdosa kita kalau itu tidak kita tanya. Saya minta distop dulu rapat ini, minta diperbaiki, jangan diterima begitu saja, masa anggaran 1,8 Triliun laporannya seperti ini hanya 18 lembar dengan 5 lembar kosong tak ada informasinya disitu. Skripsi mahasiswa saja gak lulus kalau seperti ini, apalagi laporan keuangan negara," tegasnya.

as, Foto : kresno/partie/hr.

ANGGOTA DPR KRITIK RENCANA POTONG GAJI PNS UNTUK RIO HARYANTO

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, menyayangkan rencana Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terkait rencana pemotongan gaji para pegawainya demi membiayai Rio Haryanto di ajang Formula One (F1) untuk musim 2016.

Hal ini dinilai akan membebani Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemenpora.

"Pimpinan yang meminta kepada bawahannya untuk meminta potongan gajinya, terutama untuk Rio, ini kan masih ada langkah lain yang lebih cerdas. Karena kita ketahui, pendapatan

PNS Kemenpora, gaji tidak terlalu besar, namun kemudian malah dipotong, dalam keadaan ekonomi seperti ini, kan semakin kasihan," sesal Sutan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (3/03/2016).

Menurut Sutan, bisa saja pegawai



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

tidak berkeberatan ketika gajinya dipotong. Namun, dibalik itu, Sutan tidak yakin apakah pegawai tersebut benar-benar ikhlas. Menurutnya, Pemerintah harus hadir untuk membantu kekurangan pembiayaan Rio yang membutuhkan biaya 15 juta euro.

"Negara harus hadir melalui

Pemerintah. Apalagi Rio ini merupakan kebanggaan Indonesia yang bisa bergabung di ajang bergengsi internasional. Rio telah menunjukkan prestasi yang baik. Diharapkan juga memotivasi generasi muda lainnya," tegas Sutan.

Politisi yang akrab dipanggil SAH ini meminta, Menpora agar lebih cerdas lagi dalam mencari solusi ini. Salah satunya, berkoordinasi dengan pihak yang dapat membantu Rio dari segi pembiayaan.

"Menpora kan memiliki banyak kemitraan, seperti sesama kementerian, atau perusahaan BUMN. Jangan membebani pegawai yang notabene sudah memiliki banyak beban. Jadi kalau

saya dapat katakan, lebih baik mencari solusi yang lebih cerdas," pinta Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, Kemenpora bisa melakukan sinergi dengan Kementerian Pariwisata. Kemenpar dapat menjadikan Rio sebagai agen promosi pariwisata Indonesia. Mengingat, anggaran promosi di Kemenpar mencapai Rp 3 triliun lebih.

"Ini tinggal koordinasi antar kedua menteri. Saya rasa kalau diberikan penjelasan mengenai keuntungannya, dan koordinasi, pasti akan saling mengerti. Kita dukung itu," yakin Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu juga berharap, Pemerintah dapat melindungi aset bangsa yang memiliki potensi, seperti Rio ini. Jangan sampai Rio malah disponsori oleh negara lain, yang akhirnya disesali oleh Pemerintah.

sf. Foto : azka/parle/hr

KOMISI II TERIMA MASUKAN PEMBENTUKAN DOB

Komisi II DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Panitia Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin, Presidium Kepulauan Kabaena dan Presidium Kabupaten Konawe Timur di urang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (03/03).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman (F-Golkar), seluruh peserta audiensi menyampaikan keinginannya untuk dilakukan pemekaran daerah di wilayahnya masing-masing. Menganggapi hal itu, anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk (F-Hanura) menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh peserta audiensi sudah menjadi konsen Komisi II DPR RI guna menyerap masukan terkait Daerah Otonom baru (DOB).

"Komisi II DPR RI sangat konsen untuk meneruskan permasalahan ini agar bisa menjadi harapan teman-teman. Jika dikatakan ini masalah uang? Itu tidak sepenuhnya benar. Tujuan pemekaran itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi



Komisi II DPR Audiensi Dengan Pemkab Kutai Timur

jangan bicara uang. Mau ada uang atau tidak itu bukan urusan kita. Nah ini kadangkala salah persepsi di pemerintah pusat. Pemerintah belum sepenuhnya sama pemikirannya dengan rakyat daerah. Jadi oleh karena itu saya mengharapkan aspirasi ini ditampung untuk sama-sama kita akhiri persoalan ini. Kita sampaikan pada pemerintah," ujar Rufinus.

Selain itu, Rufinus juga menegaskan bahwa terkait DOB ini muaranya adalah pemerintah. Namun begitu DPR sejak awal sudah mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. "Nah, jangan sampai kita di Komisi II DPR RI menjadi bulan-bulanan nantinya. Kita harus pahami bahwa

Komisi II DPR RI sejak menerima masukan dari berbagai pihak tentang DOB sudah mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukannya. Bahkan dalam kesimpulan rapat terakhir itu sampai ada tarik ulur hingga 15 menit. Jadi bisa dikatakan aktivitas dialog ini semua bermuara pada pemerintah," ujar Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II ini.

Politisi Hanura Rufinus juga menegaskan, DPR bertindak sebagai supporting system agar apa yang diinginkan masyarakat terkait DOB ini bisa terpenuhi. "Kalau dikatakan bahwa Komisi II DPR tidak memiliki kewenangan ya memang tidak memiliki kewenangan. Tetapi kita menjadi supporting system agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita bawa persoalan ini pada pemerintah agar segera diselesaikan," imbuhnya.

Komisi II DPR, lanjut dia, tidak ada yang tidak sepakat jika memang persiapan pembentukan DOB sudah selesai. Ada istilah di media tentang moratorium, menurut Rufinus sebenarnya tidak ada. Yang dimaksud moratorium itu yakni ada waktu 3 tahun untuk masa persiapan agar hubungan antara yang mau dimekarkan dengan daerah induk itu bisa selesai. Karena bagaimanapun, daerah baru harus bergantung pada wilayah sebelumnya untuk dibiayai sehingga bisa dilepas dikemudian hari," paparnya.

hs.mp. Foto : runi/parle/hr



LEGISLATOR DORONG KEMENRISTEKDIKTI TERTIBKAN KAMPUS ABAL-ABAL

Anggota Komisi X DPR Jefirston Riwu Kore mendorong Kemenristekdikti untuk dapat terus menertibkan kampus, khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) abal-abal. Pasalnya, keberadaan kampus berizin tak jelas ini telah meresahkan dan merugikan banyak pihak, khususnya mahasiswanya.

"Akibat dari kampus abal-abal ini, banyak yang dirugikan, salah satunya anak-anak kita. Kemenristekdikti jangan berhenti untuk menertibkan. Kita jangan hanya diam," tegas Jefri, di sela-sela rapat dengan Menristekdikti Muhamad Nasir beserta jajaran, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (3/3).

Jefri menilai, kampus abal-abal ini masih menjamur di berbagai daerah, tak terkecuali di dapilnya, Nusa Tenggara Timur. Seharusnya, Kemenristekdikti lebih selektif dalam memberikan izin kepada pihak yang ingin mendirikan PTS.

"Masih banyak di daerah. Mereka mendirikan kampus di kota besar, kemudian membuka cabang di daerah

terpencil. Misalnya buka di Jakarta, kemudian buka cabang di Kupang, lalu buka cabang lagi di Flores," keluh Jefri.

Namun di satu sisi, politisi F-PD itu mengapresiasi kinerja Kemenristekdikti dalam menertibkan kampus abal-abal itu. Menurutnya, sebenarnya syarat yang diberikan Kemenristekdikti untuk mendirikan PTS sudah cukup ketat, namun kadang masih 'kecolongan'.

"Kalau mengenai syarat yang diajukan Kemenristekdikti, sudah cukup baik. Memang harus kita seleksi lebih ketat. Kemenristekdikti jangan ada kompromi terhadap syarat-syarat yang diberikan. Jangan diakal-akalin dan jangan ada kompromi," tegas Jefri.

Dalam kesempatan itu, Jefri juga mendorong Pemerintah juga untuk selalu menertibkan kasus ijazah palsu. Dirinya pun mengapresiasi langkah Menristekdikti yang dulu sudah melakukan penertiban, dan meminta untuk terus dijalankan.

Sementara itu dihadapan anggota Komisi X, Menristekdikti M. Nasir



Anggota Komisi X DPR Jefirston Riwu Kore

menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap PTS yang bermasalah atau abal-abal, dan didapatkan hasil bahwa kondisi PTS bermasalah, baik itu dalam proses pembinaan atau non aktif, per Februari 2016 tinggal 21 PTS, dari 243 PTS bermasalah pada September 2015.

"Rinciannya, 9 PTS bermasalah terkait hukum di internal yayasan. 12 PTS dalam pembinaan, namun ada kemungkinan ditutup atau dibuka, masih diproses penyelesaiannya di Kopertis. Sementara untuk PTS yang tidak berizin, sudah diproses di Kepolisian," jelas Nasir.

si/nt, Foto: azka/parle/hr.

KOMISI IV SAYANGKAN MASUKNYA IMPOR BUAH ILEGAL



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron tinjau Karantina Pertanian

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menyayangkan praktek import buah ilegal sebanyak 34 kontainer atau setara dengan 609.986 kilogram buah jeruk, pir, dan apel tanpa jaminan kesehatan asal Negeri Tiongkok. Selain itu, jeruk ilegal asal negeri Tiongkok yang tidak disertai jaminan kesehatan ini berpotensi membawa alat buah yang sangat menyukai buah jeruk sebagai mediana.

"Alat buah ini sangat berbahaya untuk holtikura kita, karena bisa menyebabkan gagal

panen terutama tanaman jeruk dalam negeri pada skala besar. Hal ini tentunya akan sangat merugikan para petani, untuk itu perlu tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar," kata Herman saat memimpin kunjungan kerja di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Surabaya, Jum'at (4/3).

Selama ini, tambah Herman, proses karantina pertanian dilakukan setelah proses di Bea Cukai selesai, padahal seharusnya diletakkan di depan untuk mencegah import buah ilegal seperti ini.

"Kami menempatkan proses karantina pertanian (import) pada Revisi UU Karantina di garda paling depan dan juga kelembagaannya kita perkuat menjadi badan yg langsung bertanggung jawab pada presiden" ujar politisi asal F-Demokrat ini.

Untuk itu, lanjut Herman, Badan Karantina nasional harus segera diwujudkan dan mudah-mudahan dapat disambut baik oleh pemerintah, karena saat ini baru



masuk sebagai usul inisiatif DPR dan segera akan diparipurnakan dalam waktu dekat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, akibat dari import buah ilegal ini bisa menyebabkan potensi kerugian petani sebesar 2,2 triliun. Jika telur dan larva lalat buah yang terbawa didalam buah jeruk ilegal ini menjangkiti tanaman jeruk dalam negeri.

Ditambahkannya, di Jepang pernah terkena wabah penyakit lalat jenis ini, dan menyebabkan gagal panen hingga

mencapai 50 persen. Untuk itu, kasus ini perlu ditindak secara tegas. " Kita akan segera membawa kasus ini ke ranah hukum, karena diduga melanggar pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun" ujarnya

Namun, kata Amran, ada hikmahnya kejadian ini, " Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia lebih mencintai dan mengkonsumsi buah Nusantara yang lebih sehat dan juga demi

meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia" tutupnya.

Hadir pula dalam pertemuan ini, BULOG, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dan Anggota DPR Komisi VI Sudin, Henky Kurniadi, I Made Urip, Delia Pratiwi Sitepu, Saniatul Lativa, Azhar Romli, Mohammad Suryo Alam, OO Sutisna, Sjahrani Mataja, Luther Kombong, Guntur Sasono, Eko Hendro Purnomo, Taufiq R Abdullah, Hermanto, Rofi' Munawar, Zainut Tauhid Sa'adi, Hamdani dan Sulaeman L Hamzah.

jk.mp. Foto : jaksa/parle/hr.

KEH DPR MINTA PEMERINTAH ALOKASIKAN APBN UNTUK MITIGASI PENCEMARAN

Anggota Komisi VII DPR-RI, Satya Widya Yudha dalam acara Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) DPR Kamis, (3/3) mendorong pemerintah untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi upaya mengurangi resiko pencemaran lingkungan.

yang hadir pada acara tersebut memberi perhatian pada isu-isu lingkungan. Menurutnya kalau saat ini tidak memulai menata lingkungan maka ke depan lingkungan akan semakin rusak.

"Jadi kalau sekarang kita tidak melakukan tata kelola isu-isu lingkungan dengan cara baik maka, ke depan ini akan sangat sulit," ujar Mercy yang merupakan Anggota Dewan dari dapil Maluku.

Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) DPR-RI adalah kumpulan anggota DPR lintas komisi dan fraksi yang memberikan

Harus ada uang yang dialokasikan dari APBN untuk memberikan mitigasi hal-hal yang mencemarkan lingkungan," tandas anggota Dewan dari dapil Jawa Timur IX saat acara Kaukus Ekonomi Hijau DPR bersama Komunitas We Green Industri dengan tajuk Harmonisasi Industri & Lingkungan di Gedung Nusantara KK I.

Dia menilai APBN Indonesia masih tidak berpihak terhadap lingkungan. Dalam forum yang dihadiri oleh para mahasiswa lintas kampus yang peduli lingkungan ini, Satya menyarankan agar mahasiswa paham tentang pranata ketatanegaraan anggaran nasional. "Ini harus disadari oleh mahasiswa, APBN kita hanya memodali kita untuk mengembangkan yang sangat basic," jelasnya.

Dia melanjutkan, APBN masih belum mendanai aktifitas-aktifitas yang menguraing emisi. Menurutnya peran ini hanya dilakukan oleh para pelaku industri, ini pun belum cukup. Oleh sebab itu dia mengatakan dengan tegas, " Kita harus

mereformasi APBN."

Selain alokasi APBN pada sektor pelestarian lingkungan, Satya bersama KEH DPR juga sedang berupaya untuk merencanakan pembuatan undang-undang perubahan iklim. "Kita di DPR di Kaukus Ekonomi Hijau mendorong perlunya undang-undang perubahan iklim," papar Politisi dari Fraksi Partai Golkar.

Dia beranggapan dengan adanya Undang-undang Perubahan Iklim, maka ada upaya kedisiplinan penggunaan anggaran negara dalam perbaikan lingkungan. Selain itu undang-undang yang direncanakan KEH akan meminta agar program-program pemerintah mengacu pada konsep perubahan iklim.

Anggota Komisi VII DPR-RI yang juga bagian dari KEH, Mercy Christy Barends



Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha

perhatian serius terhadap persoalan lingkungan. KEH dibentuk pada 2012, lembaga ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat peran DPR dalam menjalankan pembangunan rendah karbon.

KEH DPR RI juga memiliki upaya turut mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya dukung lingkungan, melalui kerja-kerja di parlemen.

eko, mp. Foto : jaksa/parle/hr.



DPR BERHARAP OMBUDSMAN RI MAKSIMALKAN PENGAWASANNYA



Anggota Komisi II DPR Irmawan

Anggota Komisi II DPR Irmawan mengharapkan Ombudsman RI bisa memberikan pengawasan maksimal terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Ombudsman pun perlu melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat agar paham dengan tugas dan fungsi Ombudsman sebagai

pengawas pelayanan publik," kata Irmawan saat RDP dengan Ombudsman RI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/3).

Lebih lanjut, menurut politisi dari Fraksi PKB, masyarakat perlu mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman, agar bisa berperan aktif membantu tugas Ombudsman dalam melakukan pengawasannya.

Selain itu, tambahnya, Ombudsman pun harus bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dan diharapkan bisa membentuk kantor-kantor perwakilan di daerah, sampai tingkat Kabupaten maupun Kota, "Pembentukan perwakilan Ombudsman di daerah sampai Kabupaten Kota diperlukan, sebab pelayanan publik disana, saya anggap masih belum maksimal," jelas Irmawan.

mi/nt. Foto:rumi/parle/iw.

KOMISI IX HIMPUN INFORMASI TENTANG PP PENGUPAHAN

Komisi IX DPR mengunjungi PT Mayora Indah guna mendapatkan informasi mendalam mengenai PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hal ini dilakukan Panitia Kerja (Panja) Pengupahan karena saat ini Panja Pengupahan sedang melakukan evaluasi pada tersebut.

"Untuk menggali berbagai informasi dari publik, stakeholder, kami juga perlu melakukan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan." demikian dikatakan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR ke PT. Mayora Indah Tbk, Tangerang, Kamis, (3/3).

Lebih lanjut Dede mengatakan, karena mendengar langsung masukan dari kepala dinas dan serikat buruh di PT. Mayora ini bisa menjadi bahan bagi Panja pengupahan dalam merumuskan rekomendasi apa yang tepat untuk PP pengupahan.

"Ini semua masih kita gali, artinya sampai sejauh ini kita masih menemukan hal-hal yang sifatnya masih normatif, kita

juga akan melakukan kunjungan kerja nantinya ke perusahaan-perusahaan yang mungkin bermasalah, kalau ini (PT. Mayora_red) perusahaan besar dia tidak bermasalah dia hanya menurunkan skala produksinya tetapi mungkin ada perusahaan yang boleh dikatakan justru berat menerima ini, kita dengar semua nanti," harapnya.

Sementara itu, Manajer PT Mayora, M.Iksan menjelaskan, sebenarnya PP 78 ini tidak bermasalah karena tidak berlaku pada pegawai tetap, tetapi diberlakukan untuk pegawai baru atau kontrak. "Untuk pegawai tetap perusahaan ini memiliki struktur perhitungan upah sendiri yang tidak merugikan buruh dan pihak perusahaan," ungkapnya.

Dalam kunjungan ini diikuti pula oleh Anggota Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz (F- PPP), Imam Suroso (F- PDI Perjuangan), Siti Mufattahah (F-



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf

Demokrat), Tgk. Khaidir (F- Gerindra), Marwan Dasopang (F-PKB), John Kenedy Azis (F-Golkar), Zulfikar Achmad (F-Demokrat), Djoni Rolindrawan (F-Hanura).

mm/nt. Foto:jayadi/parle/hr.



MARWAN DASOPANG : BANYAK SERIKAT BURUH MENGELUH DIBERLAKUKANNYA PP PENGUPAHAN



Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang

Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang mengatakan awal mula dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Pengupahan dikarenakan banyak

serikat buruh yang mengeluh sejak diberlakukannya Peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Sejak diberlakukannya PP No. 78 tahun lalu, banyak serikat pekerja mendatangi kami Komisi IX DPR, mereka memberikan argument bahwa PP 78 itu merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha," jelas Marwan saat Komisi IX DPR melakukan kunjungan spesifik ke PT Mayora Indah Tbk, Tangerang, Kamis (3/3).

Politisi F-PKB ini menambahkan, karena hal tersebut, Komisi IX terus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahkan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan guna mengetahui sesungguhnya di pasal-pasal mana saja pada PP 78 ini yang membuat para buruh keberatan.

Ia mengatakan sebetulnya PP 78 ini baik tetapi memang ada beberapa pasal yang perlu diperhatikan, "Oleh karena itu, maka perlu dilakukan dialog agar jangan ada lagi gejolak menghitung upah buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Marwan menerangkan, Panja Pengupahan ini akan mencari letak permasalahannya agar tidak merugikan para investor atau pengusaha dan juga tidak menyakiti para buruh, "Kemungkinan kami akan merevisi PP 78 ini," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke PT. Mayora Indah Tbk, jelas Marwan, diketahui, ternyata PP 78 ini tidak berlaku bagi karyawan tetap tetapi kepada pegawai kontrak atau *outsourcing*.

"Kita mengunjungi PT. Mayora yang merupakan perusahaan besar yang kita anggap bisa menjadi semacam representasi. Disini kita menemukan selain inti dari PP 78, kita juga menemukan semacam cara pengupahan yang baik. Artinya dialog itu menjadi penting agar tidak menjadi gejolak ketika penetapan upah," terang-nya.

mm/nt. Foto: Jay/parle/hr.

PEJABAT SETJEN DPR TERIMA DPRD PARIAMAN DAN DPRD BADUNG

Dua pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI menerima dua perwakilan DPRD Tingkat II, dalam rangka studi banding. Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti menerima perwakilan DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, di ruang kerjanya, Gedung Setjen DPR Lantai III, Kamis (3/3).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Administrasi DPR, Achmad Djuned, menerima perwakilan DPRD Badung, Bali.

Dalam paparannya, Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti, menjelaskan mengenai fungsi DPR RI, proses pembahasan legislasi, hingga bagaimana mekanisme persidangan di DPR RI. Win mengatakan, seluruh jadwal persidangan DPR RI ditetapkan di Badan Musyawarah DPR. Bamus memiliki peranan penting dalam berjalannya agenda di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR.

"Kegiatan yang diatur di Bamus, memang tidak terlalu rinci. Misalnya ada

jadwal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dijadwalkan ada rapat Komisi I sampai XI AKD. Namun untuk konten acara, itu diserahkan kepada Komisi atau AKD. Namun harus bersurat kepada Pimpinan Dewan," jelas Win.



Sekjen DPR Menerima DPRD Kota Pariaman, Sumbar

Dalam pertemuan juga sempat disinggung masalah reses di DPR RI. Sebagaimana diketahui, Ketua DPR RI Ade Komarudin berkomitmen meningkatkan kinerja dewan, dengan meningkatkan aktifitas masa sidang, terutama dalam hal legislasi.

"DPR RI mengurangi jumlah reses, yang mana sebelumnya bisa lebih dari



sebulan. Tapi kini hanya 17 hari. Namun, jumlah reses yang dikurangi itu tidak boleh mengurangi intensitas Anggota Dewan di dapilnya. Sehingga, dalam reses itu menjadi kunjungan dapil sebanyak 9 hari, kunjungan kerja Komisi 5 hari, dan sosialisasi Undang-undang sebanyak 3 hari," imbuh Win.

Ditemui usai pertemuan, Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman, sekaligus ketua rombongan DPRD Pariaman, Fadhy mengatakan bahwa tujuan studi banding untuk melakukan konsultasi. Ia mengaku, pihaknya mendapat informasi yang cukup jelas dari Sekjen DPR RI.

"Tadi kami membicarakan dua tema, yakni masalah reses Anggota DPRD Tingkat II, dan mekanisme pelaksanaan APBD dengan mitra kerja kita. Selama ini kami di DPRD Tingkat II, untuk melaksanakan reses itu kesulitan untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihan, karena kesulitan masalah dana," kata Fadhy.

Politisi Partai Bulan Bintang itu mengaku ada perbedaan mekanisme penganggaran antara DPR RI dan DPRD Tingkat II.

Sementara dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Badung, Djuned

menjelaskan mengenai mekanisme kunjungan ke luar negeri. Pasalnya, DPRD Tingkat II belum mempunyai mekanisme berkaitan dengan perjalanan luar negeri.

"Posisi sebagai DPR RI akan sangat berbeda DPRD Tingkat II. Karena perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh DPR RI itu ada kaitannya bahwa DPR RI sebagai Anggota Parlemen, baik itu parlemen yang sifatnya internasional, juga yang sifatnya regional, sehingga banyak perjalanan luar negeri," jelas Djuned. Dalam pertemuan juga dibahas mengenai teknis, hak-hak, maupun protokoler perjalanan ke luar negeri.

sf/nt, Foto: Iwan Armanias/parle/hr.



PLTU BATANG HARUS PERHATIKAN AMDAL

Komisi IV DPR RI berharap pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja spesifik komisi ini ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (4/3).

"Rencana pembangunan PLTU Batang ini memang sangat baik untuk mengatasi krisis listrik nasional khususnya wilayah Jawa-Bali. Namun hal ini bukan berarti mengabaikan aspek lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itulah kami (komisi IV-red) meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan proyek PLTU itu," ungkap Wakil ketua Komisi IV, Ibnu Multazam.

Ibnu mengakui sejauh ini perencanaan yang dipaparkan oleh pihak PLTU Batang di lokasi proyek cukup memperhatikan Amdal. Namun ia tidak bisa memastikan saat pelaksanaannya ke depan apakah sesuai dengan studi kelayakan yang telah disusun sebelumnya.



Komisi IV DPR Kunspek ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah

"Dilihat dari perencanaannya sih bagus. Tapi tidak tahu juga pelaksanaannya nanti, apakah juga seperti perencanaannya atau tidak," ujar politisi dari fraksi PKB ini.

Oleh karena itu Ibnu yang didampingi anggota Komisi IV lainnya seperti Fadholi, Al Muzzamil Yusuf, Samsudin siregar, Yadi Mulyadi, Darori Wonodipuro, Andi Nawir, Syofwatillah Mohzaib, Haeruddin, Acep Adang Ruhiat, dan Agustina Wilujeng

Pramesuti ini berjanji akan terus mengawasi Amdal dari proyek PLTU ini.

"Kami akan terus mengawasi ini, mungkin dua tahun ke depan setelah proyek ini berjalan kami akan kembali lagi kesini melihat pelaksanaannya. Untuk saat ini kami berharap agar PLTU ini juga menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar," pungkasnya.

Ayu, Foto : ayu/parle/hr.



PUSAT PERLU DUKUNG DAERAH HADAPI MEA

Berlakunya pasar bebas Asean atau biasa disebut sebagai MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada awal 2016 tidak perlu dihadapi dengan ketakutan yang berlebihan. Pemerintah pusat diminta mendukung segenap potensi di daerah agar kreatif mempersiapkan diri sehingga dapat menjadikan MEA sebagai peluang bukan ancaman.

"Kita tidak bisa berjalan mundur menghadapi MEA. Persoalan yang ada tidak bisa dicatat saja tapi harus dipecahkan bersama. Kalau ingin ikut MEA, *at all cost* harus kita siapkan. Apa yang diperlukan daerah harus diberikan pusat agar daerah siap bersaing, kalau tidak sama saja membiarkan daerah bersaing dengan kemampuan terbatas," kata Ketua Tim Kunker Panja MEA di Provinsi Kepri Yoseph Umar Hadi di Batam, baru-baru ini.

Panitia Kerja yang dibentuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini melangsungkan pertemuan dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)

dan jajaran pejabat terkait lainnya.

Seluruh masukan dalam pertemuan akan menjadi bagian dari rekomendasi panja kepada komisi terkait, pemerintah dan apabila dianggap perlu menjadi bagian dalam pembicaraan dengan anggota parlemen Asean.

Yoseph pada kunker ini didampingi Idris Laena (FPG), Rita Zahara (FP Gerindra), Melanie Leimena (FPG Gerindra) dan Ferry Kase (FPHanura). Secara khusus ia

memberikan catatan kepada Pemprov Kepri yang berada di kawasan perbatasan. "Masalah keamanan pada era perdagangan bebas perlu mendapat perhatian pemda yang berada di perbatasan, lalu lintas barang meningkat kemampuan mengawasi perlu ditingkatkan," tekan dia.

Sementara itu Wagub Kepri Nurdin Basirun menjelaskan sejumlah masalah mendasar perlu mendapat perhatian pemerintah diantaranya pembangunan infrastruktur, jalan tol, sumber daya energi



Tim Kunker Panja MEA di Batam

dan air bersih. Terkait persaingan MEA menurutnya masyarakat di Kepri khususnya Batam sudah terbiasa berinteraksi dengan pengusaha dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Bersama instansi terkait pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja pekerja di Batam, Bintan dan sejumlah kawasan bisnis lainnya di Provinsi Kepri. Ia juga berharap masalah disharmoni sejumlah peraturan patut diagendakan dalam waktu dekat.

iky, Foto: iky/parle/hr

KOMISI IV BERHARAP PROGRAM ASURANSI NELAYAN SEGERA DIJALANKAN



Penandatanganan draf RUU Perlindungan Pemberdayaan Nelayan

Dengan selesainya RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di tingkat I rapat kerja Komisi, maka RUU ini akan segera disahkan menjadi Undang-undang

dalam sidang Paripurna DPR.

Salah satu kebijakan pokok yang terdapat dalam RUU itu adalah menyangkut masalah asuransi bagi nelayan kecil. Kehadiran RUU ini akan menjadi payung hukum bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya.

"Komisi IV DPR berharap agar asuransi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dapat segera dijalankan, karena anggarannya sudah tersedia," ujar Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR, di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (03/03).

Anggaran sebesar 250 miliar rupiah dari APBN, telah disiapkan oleh pemerintah guna pembayaran premi asuransi tersebut. Dalam target awal selama tahun ini,

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menjanjikan sebanyak satu juta nelayan akan mendapatkan asuransi tersebut.

Demikian juga soal pemberian subsidi, baik terhadap bahan bakar maupun insentif lainnya diatur dalam RUU ini. "Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyediaan pendanaan, pembiayaan, juga dimuat secara *rigid*, dalam rancangan undang-undang tentang nelayan ini, agar dapat memberikan dorongan wirausaha di bidang perikanan, yang pada akhirnya bisa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan," tegas politisi Partai Demokrat Dapil Jawa Barat VIII itu.

dep.mp Foto: maefurodfj/ parle/hr



SINERGITAS NILAI KEBANGSAAN DENGAN PERINTAH AGAMA



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf bersama siswa

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan nilai-nilai kebangsaan yang bersinergi dengan ketaatan menjalankan perintah agama, akan berdampak positif pada kehidupan sosial dilingkungan.

Demikian dikatakan Nurhayati saat menerima kunjungan siswa dan siswi dari SD Qurrota A'yun, Sekolah Islam

Berwawasan Internasional (SIBI) Malang, di Gedung DPR, Ruang Operation Room, Jakarta, Jum'at (4/3).

"Pendidikan kebangsaan dan keagamaan mengkhawatirkan tersaingi, karena siswa didik akan lebih suka dengan godaan pengaruh negatif dari IT (*Information and Technology*). Ada sisi positif dari IT, namun yang negatif harus dihindari dan diantisipasi," jelasnya.

Bahkan tambah Nurhayati, dirinya merasa prihatin karena banyak yang terlena dengan IT sehingga lupa dengan perintah agamanya. "Muslim lupa ke Masjid, yang Kristen lupa ke Gereja," tegas Politisi Demokrat ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika seseorang menjalankan perintah agamanya dengan benar, kehidupannya pun akan menjadi lebih baik. "Karena

ada ridho dari Allah SWT," terangnya.

Dalam kesempatan ini, dihadapan siswa siswi, Nurhayati memberikan apresiasinya kepada para pendidik yang telah memotivasi murid dalam menanamkan pendidikan kebangsaan dan keagamaan.

Selain itu, Nurhayati pun memberikan pengertiannya, bahwa kedatangan mereka ke DPR selain dalam rangka sosialisasi kepada anak sekolah sejak dini, juga untuk memberikan pengetahuan bahwa di DPR bukan saja soal jabatan namun ini adalah sebuah pengabdian.

"Mereka juga perlu tahu bahwa amanah rakyat harus dijalankan dan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Menjadi anggota DPR adalah sebuah pengabdian," tutupnya.

eko/nt, Foto: kresno/patile/hr.

SEKJEN DPR BUKA SEMINAR KESEHATAN KERJA

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti membuka seminar bertemakan Kesehatan Kerja. Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR tersebut memberikan pembekalan mengenai pentingnya mempertahankan pola hidup yang sehat disela-sela tuntutan kerja yang dinamis.

"Seminar kesehatan ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada teman-teman guna mencegah kemungkinan negatif dari dampak pola kerja yang tidak teratur karena ritme kerja yang tinggi," jelas Win sapaan akrab orang nomor 1 di Setjen saat membuka seminar kesehatan kerja di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (04/03/2016).

Menurut Win, demi meningkatkan produktivitas kerja sebagai unsur pendukung DPR, para staf seringkali

melupakan bahwa kesehatan fisik maupun psikis merupakan hal yang terpenting. "Konsentrasi dan kerja fokus itu sangat penting, tapi kalau kita gak sehat bagaimana kita konsentrasi," papar Win.

Dalam seminar tersebut, salah satu faktor yang menurunkan tingkat konsentrasi ialah stress, kata dr Erna Tresnaningsih yang menjadi narasumber. Ia mengemukakan beberapa faktor penyebab stress di tempat kerja antara lain, bekerja terlalu lama, tidak ada waktu rileks ditambah dengan sistem kerja yang dituntut cepat. Sehingga berdampak pada hal-hal kecil, seperti mudah tersinggung, sensitive terhadap kritikan, sulit

memusatkan pikiran atau perhatian bahkan menghindari interaksi dengan orang lain.

Berkenaan dengan sarana dan prasarana untuk mendukung lingkungan kerja yang sehat, Win bersama Pimpinan DPR sedang mengupayakan untuk mewujudkan green building secara simultan.



Sekjen DPR Winantuningtyastiti

ann/mp, Foto : rumi, jaw/patile/hr.

PANSUS ANGKET PELINDO II DPR KONSULTASI DENGAN BPK

Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) mengadakan Rapat Konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan perkembangan audit investigatif atas perpanjangan Kontrak JICT, KSO TPK Koja, Penerbitan Global Bond dan Pembangunan Terminal Kalibaru.



Ketua PANSUS Pelindo II Rieke Diah Pitaloka

Berdasarkan hasil rapat konsultasi, BPK sudah membentuk tim audit investigative dibawah pimpinan Prof Eddy. Kerjanya juga sudah dimulai, meskipun pemetaan investigasi sedang dalam proses perancangan," ujar Ketua Pansus Rieke usai konsultasi dengan Tim Audit Investigatif di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (03/03/2016).

Dalam pertemuan tersebut, Anggota BPK Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim

audit investigative gabungan dibawah pimpinan Prof Eddy Mulyadi. Dimana proses investigasi tersebut akan dibagi dalam dua tahapan. Pertama, melakukan analisa terhadap perpanjangan kontrak JICT secara mendalam termasuk siapa saja yang terlibat dalam proses perpanjangan tersebut Selanjutnya, menitikberatkan pada internal Pelindo termasuk sindikasi perbankan, sumber dana dan peruntukkan diterbitkannya global bond.

Pimpinan tim audit investigatif Prof Eddy mengatakan, pihaknya sudah melakukan assessment pendahuluan terhadap pola - pola pekerjaan yang nantinya akan dijadikan modus operandi dalam menentukan cara melakukan penyimpangan. " Siapa saja yang ikut serta, siapa yang setuju dan tidak setuju, harus kami identifikasi semua," ungkapnya

Di sisi lain, anggota Pansus Pelindo Nurdin Tampubolon (F-Hanura) menganggap masih banyak persoalan yang belum jelas terkait penggunaan dana global bond. "Masalah global bond harus jelas peruntukkan dan perencanaannya karena berdasarkan informasi, ada global bond yang dipakai untuk membayar down payment perpanjangan JICT. Jadi ini semrawut semua," papar Nurdin.

Sementara itu, Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka meminta kepada Tim Audit investigatif untuk menganalisa aspek - aspek penyimpangan dalam proses perpanjangan kontrak JICT termasuk komposisi saham dan pemberian dana segar oleh Hutchison Port Holdings (HPH) kepada Pelindo II.

Sebagaimana diketahui, pansus menemukan berbagai kejanggalan dalam perpanjangan kontrak JICT pada tahun 2015. Salah satu diantaranya adalah indikasi kerugian negara mencapai 26 triliun hingga tahun 2038.

"Kami berharap JICT bisa kembali ke Indonesia dan mengungkap berbagai fraud yang dilakukan bukan hanya pihak Pelindo tetapi Perbankan asing yang ada didalamnya," tutur Rieke.



BERITA BERGAMBAR



Ketua DPR Ade Komarudin menerima kunjungan kehormatan Dubes Republik Ceko untuk Indonesia HE. Mr. Ivan Hotek, Kamis (10/03), Foto : iwan/parle/hr



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima audiensi IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia), Kamis (10/03), Foto : jaka/parle/hr



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron meninjau PT. Agri Makmur Pertiwi di Kediri, Jumat (04/03), Foto: Jaka/parle/hr



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V Lasarus bersama Bupati Kubu Raya, Rusman Ali meninjau pembangunan jalan di Desa Parit Baru, Senin (07/03), Foto : riska/parle/hr.



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ibru Kec. Mestong Muaro Jambi, Senin (07/03), Foto : Naefuroji/parle/hr

